

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam proses politik dan ikut serta menentukan segala keputusan yang nantinya akan menyangkut dan mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik di negara yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu pemikiran yang mendasari adanya pemerintahan berada ditangan rakyat

sehingga partisipasi itu bisa dilaksanakan langsung oleh rakyat ataupun melalui perwakilan.

Partisipasi politik dalam analisis politik modern merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian satu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Setiap warga negara dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Proses pelaksanaan dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung berarti sebatas mendengar informasi atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi dan memilih pemimpin melalui perwakilan. Secara langsung berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Masyarakat dalam menjalankan partisipasinya harus mengerti tentang politik itu sendiri. Sedangkan untuk mengetahui apa itu politik warga negara harus memahami tentang konsep politik. Konsep politik lahir dalam pikiran (*mind*)

manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena, yang disebut sebagai teori. Pemahaman konsep politik sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bernegara sehingga masyarakat bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dalam kehidupan politiknya.

Setiap konsep dan teori sesungguhnya berawal dari sejumlah anggapan dasar (asumsi) yang menjadi titik tolak kerangka pikirnya. Demikianlah, konsep fungsionalisme berangkat dari suatu asumsi bahwa masyarakat dan sistem politik mengandung bagian-bagian yang mempunyai fungsi yang berbeda, namun mereka saling tergantung satu sama lain. Akibatnya, orang selalu dalam keadaan seimbang, konsensus dan stabil. Sebaliknya, konsep politik berdasarkan pada asumsi bahwa dalam masyarakat dan sistem politik terdiri atas bagian-bagian yang memiliki kepentingan yang berbeda sehingga masyarakatnya berada dalam keadaan tidak seimbang dengan konflik. Konsep politik sesungguhnya sama. Konsep politik sesungguhnya didasarkan pada beberapa asumsi atau anggapan dasar.

Pemahaman konsep politik adalah bagaimana seseorang mampu membedakan, menerangkan, menyimpulkan, mengelompokkan, memberikan contoh, dan menuliskan kembali setelah mereka mempelajari politik.

Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

Salah satu kegiatan politik sebagai warga negara adalah dengan partisipasi politik. Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *outputnya*.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti telah melaksanakan wawancara terhadap masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur yang tidak melakukan kegiatan partisipasi politik secara aktif yaitu masyarakat yang tidak membayar pajak dan tidak memilih pemimpin pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 2 orang yang berprofesi sebagai petani dan buruh yang tidak membayar pajak untuk kendaraan bermotor mereka. Jawaban yang sama bahwa mereka tidak ada uang untuk membayar pajak, karena uang pajak dirasa tidak sebanding dengan penghasilan mereka, jawaban kedua adalah karena mereka beranggapan bahwa kendaraan mereka tidak dipakai untuk bepergian jauh sehingga kemungkinan untuk diketahui oleh polisi sedikit. Dari wawancara kepada kedua belah pihak didapatkan

informasi bahwa sebenarnya mereka ingin membayar pajak tetapi karena faktor ekonomi mereka bersikap tidak peduli apabila mereka tidak membayar pajak.

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur yang tidak mengikuti pemilihan pemimpin pemerintahan atau disebut dengan istilah golput (golongan putih) yaitu pada pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2010. Wawancara dilakukan kepada 3 warga yang golput dalam pemilihan kepala desa dan mereka berprofesi sebagai petani. Orang pertama dia beralasan bahwa golputnya dia dalam pemilihan kepala desa tahun 2010 dikarenakan faktor pekerjaan karena pada waktu pemilihan dia memilih untuk bekerja di ladang karena pergi bekerja dirasa lebih penting dari pada memilih kepala desa, orang kedua beralasan bahwa dia malas untuk memilih karena dia beranggapan bahwa suaranya tidak akan mempengaruhi hasil suara dalam pemilihan, orang ketiga yang golput dia beralasan bahwa ada hal lain yang sedang dikerjakan pada saat pemilihan berlangsung. Dari hasil wawancara terhadap warga yang golput didapatkan informasi bahwa mereka akan menerima hasil keputusan siapa yang terpilih dalam pemilihan walupun sebenarnya mereka mengetahui calon mana yang sebenarnya cocok menjadi kepala desa. Dari wawancara tersebut didapatkan hasil sebenarnya warga kurang mengerti pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas masih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi secara aktif hal ini karena kurangnya kesadaran mereka terhadap politik. Kepasifan masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru

Kabupaten Lampung Timur terhadap partisipasi politik masih tinggi yang terlihat dari warga yang bersikap menerima apa saja setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Walaupun masyarakat mengetahui dan merasakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasa kurang mereka terima karena dianggap belum sesuai untuk masyarakat Mataram Baru.

Menurut Winataputra (2011:1.5) pengembangan masyarakat yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial tersebut tentu tidaklah mudah, terutama bagi masyarakat Indonesia yang secara historis belum memiliki pengalaman utuh berkehidupan yang betul-betul demokratis, perkembangan ekonomi yang masih terbatas, identitas nasional yang masih rapuh, dan budaya kewarganegaraan yang belum terbentuk. Masyarakat yang demokratis hanya dapat tercipta apabila masyarakatnya berpendidikan memadai dan secara ekonomis kebutuhan dasar hidupnya sudah terpenuhi. Dengan demikian, masyarakat demokratis yang religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial baru dapat terwujud apabila masyarakatnya terdidik baik dan sejahtera, sehingga mereka mau dan mampu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan asumsi tersebut masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru belum terwujud suatu masyarakat yang demokratis karena pendidikan di Dusun X Desa Mataram baru Kabupaten Lampung Timur rata-rata hanya

sampai pada jejang SD-SMP. Secara ekonomi, masyarakat dusun X Desa Mataram Baru berprofesi sebagai petani dan buruh. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru belum mampu berpartisipasi secara aktif.

Salah satu bentuk partisipasi politik yang telah dilaksanakan masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru adalah dengan mengikuti pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby* dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Proses penghitungan dimulai setelah pemungutan suara dilakukan. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Berdasarkan pernyataan di atas, masyarakat dusun X Desa Mataram Baru sudah melakukan partisipasi dengan mengikuti pemilu baik pemilu presiden sampai dengan pemilu kepala desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penyajian data melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1: Data masyarakat yang mengikuti pemilihan Kepala Desa di Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tahun 2010

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	17-25 tahun	17	16	33
2	26-35 tahun	27	17	44
3	36-45 tahun	22	21	43
4	46-55 tahun	12	17	29
5	56 tahun ke atas	14	12	26
Jumlah		92	83	175

Sumber: Data dari kepala dusun X Desa Mataram Baru

Berdasarkan tabel 1.1 di atas masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur sudah melakukan partisipasi politik dengan memilih kepala desa. Data peserta yang mengikuti pemilihan kepala desa tahun 2010 dengan umur 17-25 tahun sebanyak 33 orang, sedangkan umur 26-35 tahun sebanyak 44 orang, masyarakat dengan

umur 36-45 tahun sebanyak 43 orang, kemudian pada umur 46-55 tahun sebanyak 29 orang, dan pada umur 56 tahun ke atas ada 26 orang pemilih. Sehingga jumlah secara keseluruhan masyarakat yang mengikuti pemilihan kepala desa pada tahun 2010 di dusun X Desa Mataram Baru sebanyak 175 orang pemilih.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendah partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah : apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, partisipasi politik menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila

kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan kewenangan) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya untuk mencapai tujuan masyarakat negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut.

Partisipasi politik sangat berperan penting dalam terlaksananya kehidupan politik di lingkungan masyarakat. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga keputusan yang diambil dalam pembuatan kebijakan ataupun pemilihan ditentukan berdasarkan rakyat. Dan hasil-hasil yang akan dicapai dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Di Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur masyarakat yang melakukan partisipasi masih tergolong rendah karena kurang pemahaman masyarakat terhadap konsep politik itu sendiri, oleh sebab itu peneliti ingin sekali melakukan penelitian bagaimanakah pengaruh pemahaman konsep politik terhadap tingkat partisipasi politik dalam kehidupan bernegara masyarakat Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Berangkat dari permasalahan di atas peneliti mengambil judul “Pengaruh Pemahaman Konsep Politik terhadap tingkat Partisipasi Politik dalam Kehidupan Bernegara Masyarakat Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemahaman konsep politik
2. Partisipasi politik masyarakat
3. Kesadaran politik
4. Kepercayaan kepada pemerintah

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian ini akan dibatasi pada pemahaman konsep politik dan partisipasi politik masyarakat Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah terdapat pengaruh pemahaman konsep politik terhadap tingkat partisipasi politik dalam kehidupan bernegara masyarakat Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur”.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh pemahaman konsep politik terhadap tingkat partisipasi politik dalam kehidupan bernegara masyarakat Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bertujuan untuk mengembangkan konsep politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan khusus partisipasi politik dengan wilayah kajian Pendidikan Politik dan Kenegaraan.

b. Kegunaan Praktis

a) Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah desa seperti kepala desa dan BPD agar bisa lebih memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bagi pemerintah pusat dan daerah agar mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik.

b) Partai Politik

Memberikan masukan kepada partai politik agar menjalankan fungsinya dengan baik yaitu dengan menjadi agen penting pendidikan dan sosialisasi politik. Meningkatkan partisipasi politik

anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan serta melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan kebijakan.

c) Masyarakat

Mendorong masyarakat agar lebih memahami tentang konsep politik agar lebih meningkatkan kesadaran dalam partisipasi politik.

d) Mahasiswa

Sebagai masukan kepada mahasiswa agar saat terjun di masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang konsep politik kepada masyarakat agar mereka mengerti bagaimana cara berpartisipasi politik yang baik.

e) Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam menjalankan partisipasi politik dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang ingin meneliti masalah ini lebih lanjut.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan dengan wilayah kajian pendidikan politik dan kenegaraan, karena membahas tentang konsep politik dengan partisipasi politik.

2. Ruang Lingkup Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

3. Ruang lingkup obyek

Obyek penelitian ini adalah pemahaman konsep politik dan tingkat partisipasi politik dalam kehidupan bernegara.

4. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten lampung Timur.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.